

PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN KDRT/TPPO DI PROVINSI JAMBI



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi membuka secara resmi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tanggal 10 September 2019 bertempat di Hotel Abadi Kota Jambi.

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Aparat Penegak Hukum (APH) yang akan menjadi kelompok sasaran agar dapat menjalankan tugas dalam penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, menyelenggarakan Kegiatan Bimtek atau *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* pada tanggal 10 September 2019 di Hotel Abadi. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 13 September 2019.

“Kendala paling dirasakan saat ini adalah belum tercapainya kesamaan persepsi di kalangan Aparat Penegak Hukum tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Kurangnya responsifitas para APH terhadap korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak APH yang belum terlatih serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik perempuan dan anak korban kekerasan. APH kekurangan personil yang secara khusus dan terampil menangani permasalahan perempuan korban kekerasan, sehingga perkembangan kasus tidak berjaan seperti yang diharapkan,” demikian Dra. Luthpiah, Kepala Dinas P3PA2 Provinsi Jambi menyampaikan dalam sambutannya. Beliau juga menyampaikan agar kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana atau ruang untuk berbagi informasi dan praktek-praktek baik penanganan TPPO maupun KDRT dari aspek penegakan hukum dan memperkuat jejaring intas Kabupaten/Kota antar APH dalam proses penyelesaian kasus.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan APH tentang penanganan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang responsive gender dan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak korban KDRT dan TPPO; peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh APH/sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan dan korban TPPO terhadap perempuan dan anak, melalui penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum yang responsive gender dan mementingkan kepentingan terbaik untuk anak; serta memberikan advokasi dan fasilitasi koordinasi kabupten/kota se Provinsi Jambi untuk membentuk dan mengaktifkan GT TPPO di daerah masing-masing.

Peserta kegiatan ini terdiri atas unsureDinas PPPA Kabupaten/Kota, UPPA Polres se Provinsi Jambi, UPPA Polda Jambi, Lembaga Bantuan Hukum dan Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, berjumlah 28 orang. Adapun, Narasumber berasal dari Kementerian PPPA R.I., Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, LBH, dan UPPA Polda Jambi.



Di akhir sambutannya, Dra. Luthpiah mengharapkan bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas APH yang akan menjadi kelompok sasaran serta hasil pertemuan dapat ditindak lanjuti dengan pembentukan dan atau mengaktifkan kembali Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan orang (GT-TPPO) kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jambi.